

# csr.pdf

*by* Omi Pramiana

---

**Submission date:** 07-Jan-2020 02:58PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1239727901

**File name:** csr.pdf (314.93K)

**Word count:** 6263

**Character count:** 43031

## Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Perspektif *Shariah Enterprise Theory*

Omi Pramiana, Nur Anisah  
STIE PGRI Dewantara Jombang  
Korespondensi: omi.pramiana@gmail.com

Diserahkan: 25 Agustus 2018, Direvisi: 10 September 2018, Diterima: 8 Oktober 2018

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada BMT Masalah Kantor Cabang Pembantu Sumobito Jombang apakah sudah sesuai dengan perspektif *Syariah Enterprise Theory*. Metode penelitian dengan deskriptif kualitatif, sumber data diperoleh dari observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi *Corporate Social Responsibility* pada BMT Masalah Kantor Cabang Pembantu telah dilakukan sesuai dengan *Syariah Enterprise Theory* (SET). BMT Masalah telah melaksanakan *Corporate Social Responsibility* akuntabilitas vertikal terhadap Allah SWT yang dapat dianggap sebagai upaya koperasi untuk memenuhi prinsip syariah. BMT Masalah telah melaksanakan *Corporate Social Responsibility* Akuntabilitas horizontal terhadap nasabah yang dilakukan BMT Masalah Kantor Cabang Pembantu Sumobito Jombang dengan memberikan bantuan pembiayaan kepada UMKM. BMT Masalah telah melaksanakan *Corporate Social Responsibility* Akuntabilitas horizontal indirect stakeholders komunitas yang dilakukan BMT Masalah dengan memberikan kepedulian kepada pihak-pihak yang sama sekali tidak memberika kontribusi (baik secara keuangan maupun non keuangan). BMT Masalah telah melaksanakan *Corporate Social Responsibility* Akuntabilitas horizontal indirect stakeholders dengan lingkungan sekitar tidak banyak yang dilakukan.

**Kata kunci:** *Corporate Social Responsibility, Syariah Enterprise Theory*

### Abstract

*This study aims to determine the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) at BMT Masalah, Sumobito Jombang Sub-Branch Office, whether it is in accordance with the perspective of Sharia Enterprise Theory. The research method with qualitative descriptive, data sources obtained from observation and interviews. The results of the study indicate that the Implementation of Corporate Social Responsibility at BMT is why the Sub-Branch Office has been carried out in accordance with Sharia Enterprise Theory (SET). BMT Masalah has implemented vertical Corporate Social Responsibility accountability towards Allah SWT which can be considered as an cooperative effort to fulfill sharia principles. BMT Masalah has carried out horizontal Corporate Social Responsibility Accountability towards customers by the Sumobito Jombang Sub-Branch Office BMT Masalah by providing financial assistance to MSMEs. BMT Masalah has carried out the horizontal indirect Corporate Social Responsibility Accountability of community stakeholders carried out by BMT Masalah by giving concern to those who did not give contributions (both financial and non-financial). BMT Masalah has implemented horizontal Corporate Social Responsibility Accountability indirectly with stakeholders in the surrounding environment.*

**Keywords:** *Corporate Social Responsibility, Syariah Enterprise Theory*

## A. PENDAHULUAN

Menjelang akhir 2010, tepatnya pada tanggal 1 November 2010, telah dirilis ISO 26000 tentang *Internal Guidance for Social Responsibility*. Dirilisnya ISO 26000 telah menyadarkan para pihak, bahwa tanggung jawab sosial bukan semata-mata menjadi kewajiban korporasi, tetapi telah menjelma menjadi tanggung jawab semua pihak, baik lembaga private maupun lembaga publik, individu maupun entitas, organisasi yang mengejar laba atau yang menamakan diri nya nirlaba. Tanggungjawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) merupakan suatu tindakan yang bermula dari pertimbangan etis perusahaan yang kemudian

diharapkan untuk dapat meningkatkan ekonomi serta diikuti dengan peningkatan kualitas hidup karyawan serta keluarganya, sekaligus peningkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara luar (Hadi, 2011:48). Kecenderungan globalisasi dan meningkatnya permintaan dari stakeholder terhadap perusahaan untuk melaksanakan peran tanggung jawab sosial dan pengungkapannya mendorong keterlibatan perusahaan dalam praktik CSR. CSR sendiri merupakan pernyataan umum yang menunjukkan kewajiban perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi dalam operasi untuk menyediakan dan memberikan kontribusi kepada para pemegang kepentingan internal dan eksternal (Mansur, 2012).

*Agency theory* menjelaskan bahwa terdapat keagenan didasarkan pada hubungan kontrak antara manajemen sebagai agen dengan pemegang saham sebagai principal, sehingga selain mempunyai kepentingan dengan pemegang saham, perusahaan juga memiliki kepentingan dengan pemerintah. Untuk itu perusahaan perlu untuk sedikit berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah, sehingga perusahaan mendapat dukungan pula dari masyarakat. Dalam teori legitimasi menjelaskan bahwa sumberdaya yang potensial memberikan manfaat bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*). Untuk itu perusahaan perlu memiliki sistem pengelolaan yang berorientasi pada keberpihakan masyarakat (*society*), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Semakin buruk hubungan korporasi maka akan semakin sulit menjalankan operasional perusahaan. Hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan adalah berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama.

Baitul Mal Wa-Tamwil adalah ekonomi lembaga keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya (Soemitra, 2009: 456). Dalam penghimpunan dana (*funding*) diupayakan untuk direncanakan dengan matang, supaya menarik minat masyarakat agar bergabung dengan Baitul Mal Wa-Tamwil atau koperasi syariah (Imaniyati, 2010:26).

BMT Masalah Kantor Cabang Pembantu Sumobito Jombang beridiri pada tahun 2015 ikut serta membantu menyelesaikan permasalahan terkait dengan penyebaran kesejahteraan masyarakat ekonomi menengah kebawah. BMT Masalah Kantor Cabang Pembantu Sumobito Jombang berkembang sangat cepat ditengah lokasi pasar Sumobito Kabupaten Jombang. Dalam perjalanannya, BMT Masalah Kantor Cabang Pembantu Sumobito Jombang tentu mengalami berbagai masalah diantaranya dalam implementasi ekonomi syariah dalam penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana akan lebih sulit menjelaskan kepada nasabah yang awam dengan istilah syariah, tidak adanya system informasi debitur serta Nasabah / anggota yang susah untuk melakukan pembayaran kekantor dikarenakan sebagian besar nasabah pelaku usaha kecil. BMT Masalah Kantor Cabang Pembantu Sumobito Jombang merupakan kantor cabang sehingga sulit dilakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan adanya praktek ekonomi ribawi yang mengakar BMT Masalah berupaya untuk menghindari system riba. BMT Masalah terletak ditengah pasar Sumobito yang dekat dengan lembaga keuangan lainnya, dimana BMT Masalah termasuk memberikan harga jual yang tinggi dibandingkan dengan lembaga keuangan disekitarnya, namun banyak nasabah yang nyaman dengan *service excellent* yang diberikan oleh BMT Masalah.

Mansur (2012) menjelaskan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh Bank Syariah masih belum sesuai dengan konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET), terutama pada bagian akuntabilitas horizontal terhadap alam. Masih sedikitnya pengungkapan CSR terhadap lingkungan menunjukkan bahwa, Bank Syariah memiliki kepedulian yang rendah terhadap lingkungan perusahaan. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan Bank Syariah masih sangat terbatas, secara sukarela, dan mengedepankan profit dalam tujuan usahanya. Hal ini menjadi tidak

selaras dengan tujuan bank syariah yang didirikan dengan dasar agama yang bertujuan menciptakan keseimbangan material dan spiritual bagi pemeluknya

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada BMT Masalah Kantor Cabang Pembantu Sumobito Jombang apakah sudah sesuai dengan perspektif *Syariah Enterprise Theory*.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Penelitian Terdahulu**

Mansur (2012) menjelaskan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan oleh Bank Syariah masih belum sesuai dengan konsep *Syariah Enterprise Theory (SET)*, terutama pada bagian akuntabilitas horizontal terhadap alam. Masih sedikitnya pengungkapan CSR terhadap lingkungan menunjukkan bahwa, Bank Syariah memiliki kepedulian yang rendah terhadap lingkungan perusahaan. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan Bank Syariah masih sangat terbatas, secara sukarela, dan mengedepankan profit dalam tujuan usahanya. Hal ini menjadi tidak selaras dengan tujuan bank syariah yang didirikan dengan dasar agama yang bertujuan menciptakan keseimbangan material dan spiritual bagi pemeluknya.

Ismayanti (2015) menjelaskan bahwa setiap perusahaan, terutama perusahaan tbk., wajib menisihkan sebagian labanya untuk kegiatan sosial, yang lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)*. CSR dimaksudkan untuk menunjukkan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat sekitar tempat perusahaan mereka beroperasi. Kegiatan CSR ini perlu dilaporkan oleh perusahaan kepada masyarakat dan pemegang saham, dalam bentuk Laporan CSR. Namun dalam prakteknya, masih ada beberapa perusahaan yang belum menyusun secara rapi laporan CSR tersebut. Bahkan pada bank syariah, hanya beberapa bank saja yang sudah menerbitkan laporan CSR nya. Akuntansi CSR sangat penting bagi lembaga keuangan syariah, khususnya bank umum syariah. Adanya dana kebajikan dalam laporan keuangan Bank Syariah, mewajibkan bank syariah untuk melaporkan penggunaan dana tersebut secara mendetail. Namun, Akuntansi CSR pada bank syariah belum memiliki standar khusus dalam hal pelaporan dan pengungkapannya, sehingga laporan CSR yang dilaporkan oleh bank-bank syariah masih menggunakan standar mereka masing-masing. Bahkan beberapa bank belum menerbitkan laporan CSR perusahaan mereka. Setiap pengeluaran yang mereka gunakan untuk kegiatan sosial hanya dicatat secara sederhana tanpa ada bentuk laporan khusus.

Lahuri (2013) menerangkan Islam memandu pebisnis menggunakan hasil usahanya untuk tiga tujuan/sasaran, yaitu kepentingan masyarakat di jalan Allah (S-CSR), kepentingan keluarga inti atau tanggungan, dan kepentingan kelanjutan bisnis itu sendiri. Dari hasil yang diterima pembisnis untuk memenuhi ketiga kewajiban menunjukkan bahwa bobot kepedulian pengusaha untuk ketiga sasaran pengguna hasil bisnis itu hendaknya tidak berbeda. Kebutuhan masyarakat di jalan Allah, kebutuhan keluarga inti atau tanggungan, dan kebutuhan berproduksi sama-sama harus diperhatikan oleh pengusaha.

### **2. Agency Theory and Legitimacy Theory**

Menurut Jensen dan Meckling dalam Siagian (2011:10) hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan diri sendiri. Pemegang saham dan manajer memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing menginginkan tujuan mereka terpenuhi. Akibat yang terjadi adalah munculnya konflik kepentingan. Pemegang saham menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang mereka tanamkan sedangkan manajer

menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan.

Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik. O'Donovan (2002) dalam buku Hadi (2011: 87) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumberdaya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*).

Menurut Gray et.al,(1996) dalam buku Hadi (2011,88) menjelaskan bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan masyarakat (*society*), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu system yang mengedepankan keberpihakan kepada *society*, operasi perusahaan harus kongruen dengan harapan masyarakat.

### 3. Stakeholder Theory

Premis dasar dari teori stakeholder adalah bahwa semakin kuat hubungan korporasi, maka akan semakin baik bisnis korporasi. Sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi maka akan semakin sulit. Hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan adalah berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama. Teori stakeholder adalah sebuah konsep manajemen strategis, tujuannya adalah untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif (Mardikanto, 2014:68).

Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Gray, Kouhy dan Adams mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholders sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin powerful stakeholder, maka semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholdernya (Handoko, 2014: 74).

### 4. Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut (Wibisono 2009:8) CSR adalah tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi sosial dan lingkungan (*triple bottom line*). Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Menurut (Prastowo dan Huda 2011:17): CSR adalah mekanisme alami sebuah perusahaan untuk 'membersihkan' keuntungan-keuntungan besar yang diperoleh. Sebagaimana diketahui, cara-cara perusahaan untuk memperoleh keuntungan kadang-kadang merugikan orang lain, baik itu yang tidak disengaja apalagi yang disengaja. Dikatakan sebagai mekanisme alamiah karena CSR adalah konsekuensi dari dampak keputusan-keputusan ataupun kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh perusahaan, maka kewajiban perusahaan tersebut adalah membalikkan keadaan masyarakat yang mengalami dampak tersebut kepada keadaan yang lebih baik.

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

### 5. CSR dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, CSR merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mendapatkan ridho Allah SWT. Disamping itu, CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam, Allah adalah pemilik mutlak (haqiqiyah) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (temporer) yang berfungsi sebagai penerima amanah (Djakfar, 2009: 160).

Menurut Nursahid (2009:21) menjelaskan terdapat sejumlah alasan mengapa perusahaan memiliki program-program filantropik atau kedermawanan sosial, yaitu: pertama, untuk mempraktikkan konsep “*good corporate citizenship*” (perilaku perusahaan kepada stakeholder), kedua, untuk meningkatkan kualitas hidup, dan ketiga, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terdidik. Zakat merupakan contoh ajaran filantropi yang diwajibkan kepada setiap pemeluk Islam yang berkemampuan, di samping itu pula ada yang disunnahkan seperti pemberian wakaf, infak, sedekah dan bentuk kebajikan lainnya. Betapa besar kepedulian Islam terhadap orang-orang yang sepatutnya dibantu (*mustad'afin*) antara lain sebagaimana sabda rasulullah SAW: “tidaklah beriman kepadaku, orang yang tidur kekenyangan dimalam hari, sementara tetangganya sedang ditimpa kelaparan padahal dia tahu”. Substansi ajaran ini mengingatkan kepada umat Islam agar mempunyai kepekaan terhadap orang lain, karena hal itu merupakan parameter kadar Iman seorang terhadap Tuhannya selaku pemilik mutlak alam semesta beserta isinya. Bukankah ajaran filantropi seperti ini secara substantif bisa diimplementasikan melalui sebuah institusi bisnis yang antara lain dalam bentuk program CSR.

Dalam perspektif Islam, kebijakan perusahaan dalam mengembang tanggung jawab sosial (CSR) terdapat tiga bentuk implementasi yang dominan yaitu (Beekun, 2004:63):

- a. Tanggung Jawab Sosial (CSR) terhadap para pelaku dalam perusahaan dan stakeholder. Stakeholder terdiri dari investor atau pemilik, kreditor, pemasok, pelanggan, karyawan, pemerintah dan masyarakat. Islam mendorong terwujudnya hubungan kemitraan antara pelaku bisnis dengan stakeholders internal maupun eksternal perusahaan dalam hal kebaikan dan saling menguntungkan.
- b. Tanggung Jawab Sosial (CSR) terhadap lingkungan alam. Bagian utama yang juga harus diperhatikan dalam kaitannya dengan CSR adalah lingkungan alam. Lingkungan alam dapat berupa lingkungan alam biotik ataupun abiotik, baik yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui. Fenomena hujan asam, pemanasan global, teracuninya rantai makanan, kepunahan, perubahan musim adalah sebagai akibat dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Sehingga, korporat salah satunya bank syariah harus andil terhadap perbaikan lingkungan, ramah lingkungan, serta selalu mendukung dan proaktif dalam pelestarian lingkungan.
- c. Tanggung Jawab Sosial (CSR) terhadap kesejahteraan sosial secara umum. Selain bertanggungjawab terhadap pihak yang berkepentingan terhadap usahanya dan lingkungan alam, perbankan syariah juga sudah seharusnya memberikan perhatian terhadap kesejahteraan umum masyarakat. Islam selalu menyeru untuk berbuat kedermawanan terhadap kaum lemah, miskin dan marginal.

### 6. Syariah Enterprise Theory

Menurut Widjaya (2012:354) konsep *Enterprise Theory* menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada di satu tangan, melainkan berada pada banyak tangan, yaitu stakeholder. Oleh karena itu *enterprise theory* direkomendasikan untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja. Tetapi, dalam konsep syariah belum

mengakui adanya partner tidak langsung yang memberikan kontribusi ekonomi karena partner tidak langsung ini mempunyai hak atas nilai tambah yang telah diperoleh perusahaan.

*Enterprise theory* merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok stakeholders. Dalam Syariah *Enterprise Theory*, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah. *Enterprise theory* mengajukan beberapa konsep terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan, terutama pada perbankan syariah (Meutia, 2010:239).

*Enterprise theory* mengajukan beberapa konsep terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan, terutama pada perbankan syariah. Konsep-konsep tersebut, dijelaskan Meutia (2010:239), adalah:

- a. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan bentuk akuntabilitas manusia terhadap Tuhan dan karenanya ditujukan untuk mendapatkan ridho (*legitimasi*) dari Tuhan sebagai tujuan utama.
- b. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memiliki tujuan sebagai sarana pemberian informasi kepada seluruh stakeholders (*direct, in-direct*, dan alam) mengenai seberapa jauh institusi tersebut telah memenuhi kewajiban terhadap seluruh stakeholders.
- c. Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah wajib (*mandatory*), dipandang dari fungsi bank syariah sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan syariah.
- d. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memuat dimensi material maupun spriritual berkaitan dengan kepentingan para stakeholders.
- e. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus berisikan tidak hanya informasi yang bersifat kualitatif, tetapi juga informasi yang bersifat kuantitatif.

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sesuai dengan Syariah *Enterprise theory* pada perbankan syariah terdiri dari dua dimensi menurut Meutia (2010:239), sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas Vertikal: Allah SWT  
Akuntabilitas vertical meliputi pertanggungjawaban yang ditujukan kepada Allah SWT. Beberapa contoh akuntabilitas vertical, yaitu adanya opini Dewan Pengawas Syariah dan adanya pengungkapan mengenai fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi berserta alasannya.
- b. Akuntabilitas Horizontal: *Direct Stakeholders* terhadap Nasabah  
Akuntabilitas horizontal kepada nasabah contohnya adalah adanya pengungkapan kualifikasi dan pengalaman anggota Dewan Pengawas Syariah, laporan dana zakat dan qardhul hasan serta audit yang dilakukan terhadap laporan tersebut, informasi produk dan konsep syariah yang mendasarinya, penjelasan tentang pembiayaan dengan skema profit dan loss sharing, dan penjelasan tentang kebijakan atau usaha untuk mengurangi transaksi non syariah dimasa mendatang.
- c. Akuntabilitas Horizontal: *Direct Stakeholders* terhadap Karyawan  
Akuntabilitas horizontal kepada karyawan contohnya adalah adanya pengungkapan mengenai kebijakan upah dan remunerasi, kebijakan mengenai pelatihan yang meningkatkan kualitas spiritual karyawan dan keluarganya, ketersediaan layanan kesehatan dan konseling bagi karyawan, dan kebijakan non diskriminasi yang diterapkan pada karyawan dalam hal upah, training dan kesempatan karir.
- d. Akuntabilitas Horizontal: *Indirect Stakeholders*  
Akuntabilitas horizontal kepada *indirect stakeholder* adalah pertanggungjawaban kepada komunitas. Beberapa contoh akuntabilitas horizontal kepada komunitas adalah adanya

pengungkapan tentang inisiatif untuk meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank islam, kebijakan pembiayaan akan isu-isu diskriminasi dan HAM, kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak, dan kontribusi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dibidang agama, pendidikan dan kesehatan

e. Akuntabilitas Horizontal: Alam

Akuntabilitas horizontal kepada alam contohnya adalah adanya pengungkapan tentang kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan, adanya jumlah pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan dan alasan memberikan pembiayaan tersebut, dan usaha-usaha meningkatkan kesadaran kepada pegawai.

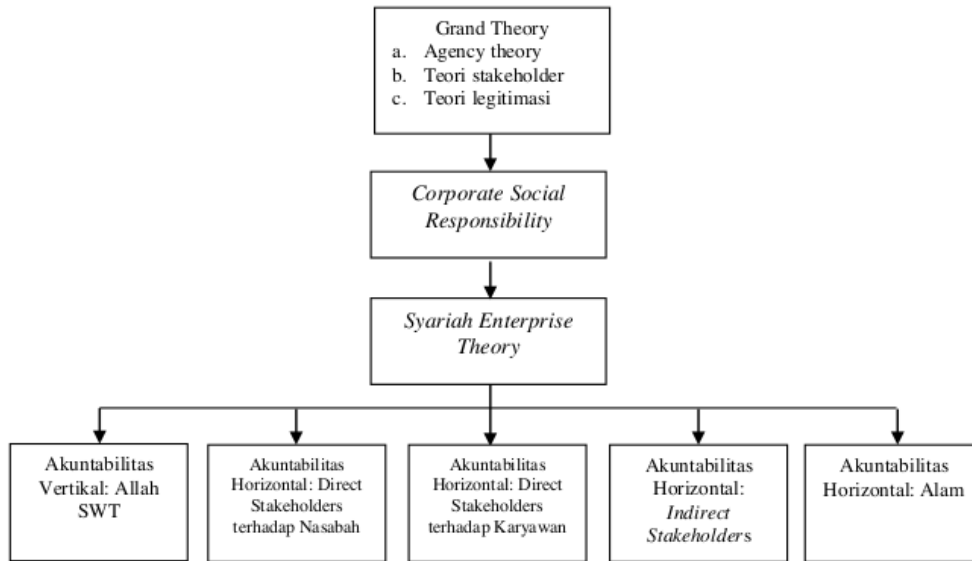
## 7. Kerangka Berfikir

Untuk menjaga eksistensi perusahaan, maka harus menjaga hubungan dengan stakeholdernya dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan stakeholder-nya, terutama stakeholder yang mempunyai power terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain (Chariri dan Ghazali, 2007). Teori legitimasi menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan berada, dimana mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktifitas mereka (perusahaan) diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang sah (Deegan, 2004). Dengan demikian perilaku atau cara perusahaan memperhatikan dan melibatkan seluruh stakeholdernya merupakan konsep utama CSR. Kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan-peraturan yang menyangkut aspek ekonomi, lingkungan dan sosial bisa dijadikan indikator atau perangkat formal dalam mengukur kinerja CSR suatu perusahaan. Namun, CSR sering dimaknai sebagai komitmen dan kegiatan-kegiatan sektor swasta yang lebih dari sekedar kepatuhan terhadap hukum (Suharto, 2010:03).

CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memerhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan (Fahmi, 2014:81). Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sesuai dengan Syariah *Enterprise theory* pada perbankan syariah terdiri dari dua dimensi menurut Mutia (2010, 239) terdiri dari Akuntabilitas Vertikal: Allah SWT, Akuntabilitas Horizontal: Direct Stakeholders terhadap Nasabah, Akuntabilitas Horizontal: Direct Stakeholders terhadap Karyawan, Akuntabilitas Horizontal: *Indirect Stakeholders* dan Akuntabilitas Horizontal: Alam

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini bisa di gambarkan sebagai berikut:





**Gambar 1: Kerangka Berpikir**

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Masalah kantor cabang pembantu Sumobito Jombang ini berjenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif (Arifin, 2012: 29).

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil data akan difokuskan berupa pertanyaan secara deskriptif dan tidak mengkaji suatu hipotesa serta tidak mengkorelasi variabel.

### 2. Sumber Data dan Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama data primer dimana merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut. data yang diperoleh melalui wawancara atau kuesioner (Tanzeh, 2009:54). Data primer diambil dari pernyataan dari kepala cabang pembantu dan karyawan bagian lainnya. Kedua data sekunder dimana merupakan data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan (Moleong, 2011:157). Data sekunder dapat berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip.

Adapun informasi data didapatkan dari wawancara dengan informan yaitu:

- Kepala cabang pembantu BMT sebagai Informan kunci (key informan)
- karyawan BMT Masalah kantor cabang pembantu Sumobito sebagai informan utama
- Masyarakat sekitar kantor BMT sebagai informan tambahan

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dimana peneliti mengacu pada proses observasi participant (pengamatan berperan serta) yaitu dengan cara peneliti melibatkan secara langsung dan berinteraksi pada kegiatan yang dilakukan oleh subyek penelitian dalam lingkungannya, selain itu juga mengumpulkan data secara sistematis dalam bentuk catatan lapangan (Hadi, 2009:91).

### 3. Definisi Variabel Dan Pengukuran Operasional

*Corporate Social Responsibility* merupakan bagaimana bentuk tanggungjawab atas operasional perusahaan. Item-item *Corporate Social Responsibility* dalam perspektif *Syariah Enterprise Theory* sebagai berikut:

**Tabel 1: Item-item Corporate Social Responsibility dalam perspektif Syariah Enterprise Theory**

Dimensi	Indikator
Akuntabilitas Vertikal: Allah SWT	Opini Dewan Pengawas Syariah
	Menggunakan fatwa dan aspek oprasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya
Akuntabilitas Horizontal: Direct Stakeholders terhadap Nasabah	Kualifikasi dan pengalaman anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)
	Kegiatan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
	Renumerasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)
	Ada atau tidak transaksi/sumber pendapatan /biaya yang tidak sesuai syariah Islam
	Jumlah transaksi sesuai syariaah Islam
	Alasan adanya transaksi tersebut
	Informasi produk dan konsep syariah yang mendasarinya
	Laporan tentang dana zakat dan qardul hasan
	Audit atas laporan zakat dan qardul hasan
	Penjelasan atas sumber dan penggunaan dana zakat dan qardul hasan
	Penjelasan tentang pembiayaan dengan skema <i>profit and loss sharing</i>
	Jumlah pembiayaan dengan skema <i>profit and loss sharing</i>
	Prosentase pembiayaan <i>profit and loss sharing</i> dibandingkan dengan pembiayaan lainnya
	Kebijakan/usaha untuk memperbesar porsi <i>profit and loss sharing</i> dimasa mendatang
	Alasan atas jumlah pembiayaan dengan skema <i>profit and loss sharing</i>
Penjelasan tentang kebijakan atau usaha untuk mengurangi transaksi non syariah dimasa mendatang	
Akuntabilitas Horizontal: Direct Stakeholders terhadap Karyawan	Upah dan remunasi
	Pemberian pelatihan dan pendidikan kepada karyawan
	Data jumlah karyawan berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan termasuk pekerja kontrak
	Banyaknya pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada karyawan
	Penghargaan kepada karyawan
	Adakah pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas karyawan
	Upaya untuk meningkatkan kualitas spiritual keluarga karyawan
	Ketersediaan layanan kesehatan dan konseling bagi karyawan dan keluarganya
	Fasilitas lainnya yang diberikan kepada karyawan dan keluarganya seperti beasiswa dan pembiayaan khusus
Kebijakan non diskriminasi yang diterapkan pada karyawan dalam upah, training dan karir	
Akuntabilitas Horizontal: Indirect Stakeholders Komunitas	Inisiatif untuk meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan koperasi
	Adakah kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan HAM
	Adakah kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak
	Upaya yang dilakukan untuk mendorong UMKM
Akuntabilitas	Jumlah pembiayaan yang yang diberikan nasabah

Horizontal: <i>Indirect Stakeholders</i> Komunitas	Jumlah dan prosentase pembiayaan yang diberikan nasabah
	Kontribusi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dibidang agama, pendidikan, kesehatan dan jumlahnya
	Sumbanga/ shadaqqah untuk membantu kelompok masyarakat yang mendapat bencana
Akuntabilitas Horizontal: <i>Indirect Stakeholders</i> Alam	Kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan
	Adakah pembiayaan terhadap usaha yang berpotensi merusak lingkungan
	Alasan melakukan pembiayaan tersebut
	Meningkatkan kesadaran lingkungan kepada pegawai dan pelatihan, ceramah dan program lainnya
	Kebijakan internal yang mendukung program hemat energy dan konservasi
	Kontribusi terhadap organisasi yang memberikan pelestarian lingkungan
Kontribusi langsung terhadap lingkungan	

#### 4. Metode Analisis Data

Sugiyono (2014:246) mengatakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Kegiatan dalam proses analisis data kualitatif terdiri dari:

- Pengumpulan Data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
- Data *Reduction* (Reduksi data) sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
- Data *Display* (Penyajian data). Rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
- Conclusion/Verying* (Penarikan simpulan). Dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun polapola pengarah dan sebab akibat.

#### D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Awal mula berdirinya BMT Sidogiri yaitu dari rasa keprihatinan para ustadz alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang masuk dalam pengurus Urusan Guru Tugas (UGT) karena semakin banyaknya praktik riba yang terjadi di sekitar pondok pesantren Sidogiri. Seiring dengan berjalannya waktu pada tanggal 4 September 1997, disahkanlah BMT MMU sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi Nomor 608/BH/KWK.13/IX/97. BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa pengurus BMTMMU dan orang-orang yang berada dalam satu kegiatan UGT-PPS (Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri) termasuk pimpinan madrasah, guru, alumni, dan partisipan PPS yang tersebar di Jawa Timur.

Salah satu Unit Layanan Baitul Mal wat Tamwil yang ada di Jombang adalah BMT yang beralamatkan di Pasar Sumobito yang didirikan pada tahun 2015.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan dengan kepala cabang pembantu BMT Masalah Kantor Cabang Pembantu Sumobito Jombang, maka tinjauan implementasi *Corporate Social Responsibility* dalam perspektif *Syariah Enterprise Theory* sebagai berikut:

### 1. Akuntabilitas Vertikal: Allah SWT

Dalam *Syariah enterprise theory*, Allah adalah sumber utama. Sesuatu yang dimiliki oleh para stakeholder adalah amanah dari Allah sehingga stakeholder bertanggungjawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mendapatkan ridho Allah dengan menjadikan amanah tersebut membawa rahmat bagi seluruh alam.

Akuntabilitas vertikal terhadap Allah SWT yang dapat dianggap sebagai upaya koperasi untuk memenuhi prinsip syariah antara lain dapat dilihat melalui keberadaan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas yang terdapat dalam BMT Masalah Kantor Cabang Pembantu Sumobito Jombang mempunyai pendidikan rata-rata Sarjana Agama, sebab latar belakang pendidikan DPS adalah pesantren sehingga mereka meneruskan pendidikan dibidang ilmu keagamaan. Saat ini DPS BMT Masalah Kantor Cabang Pembantu Sumobito Jombang telah sampai pada pascasarjana bahkan salah satunya sudah mendapat gelar doctor, sehingga BMT Masalah Kantor Cabang Pembantu Sumobito Jombang dapat dikatakan merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat dikatakan baik karena DPS BMT Masalah Kantor Cabang Pembantu Sumobito Jombang berlatar belakang pendidikan dibidang syariah muamalah maupun dibidang perekonomian islam dengan jenjang pendidikan yang tinggi.

### 2. Akuntabilitas Horizontal: Direct Stakeholders terhadap Nasabah

Akuntabilitas horizontal terhadap nasabah yang dilakukan BMT Masalah Kantor Cabang Pembantu Sumobito Jombang dengan memberikan bantuan pembiayaan kepada UMKM. Pembiayaan menggunakan salah satu dari 5 akad yaitu mudharabah/qirad dan musyarakah/syirkah, murabahah, bai' bitsaman ajil dan qardh hasan yang merupakan untuk pinjaman sosial tanpa laba. Dalam muamalah pola syariah tidak menggunakan imbalan bunga tetapi menggunakan imbalan bagi hasil untuk mudharabah dan musyarakah atau imbalan laba untuk murabahah dan bai' bitsamanil ajil (BBA). Semua kegiatan operasional itu dilakukan proses kontrol oleh DPS untuk melakukan mitigasi terhadap penyelewengan dari syariah. Meskipun baru berjalan pada tahun 2015, namun BMT Masalah telah mendapatkan kepercayaan dari nasabah hal ini terbukti dengan semakin banyaknya nasabah pembiayaan yang memilih BMT Masalah meskipun dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Para karyawan BMT Masalah selalu memberikan penjelasan akan setiap akad yang dilakukan dengan nasabah sehingga nasabah memahami maksud dan tujuan dari masing-masing transaksi dalam akad, termasuk akad akan bagi hasil, biaya administrasi dan dana zakat. Dalam kegiatannya BMT Masalah selalu berusaha untuk mengurangi transaksi non syariah dimasa mendatang.

Hal ini sesuai dengan *Stakeholder Theory* semakin kuat hubungan korporasi, maka akan semakin baik bisnis korporasi. Sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi maka akan semakin sulit. Hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan adalah berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama (Mardikanto, 2014:68). BMT Masalah menjalin hubungan silaturahmi yang baik dengan nasabah, ditunjukkan dengan kunjungan karyawan ke rumah atau usaha nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa BMT Masalah memberikan service excellent yang baik kepada nasabah.

### 3. Akuntabilitas Horizontal: Direct Stakeholders terhadap Karyawan

Akuntabilitas horizontal terhadap karyawan yang dilakukan BMT Masalah Kantor Cabang Pembantu Sumobito Jombang dengan pemberian pelatihan dan pendidikan kepada karyawan. BMT Masalah melakukan peningkatan ketrampilan karyawan lewat studi lanjut dan pelatihan-pelatihan. BMT Masalah memiliki sistem rekrutmen yang bagus dimana

karyawan BMT Masalah rata-rata sarjana dari berbagai jurusan, meskipun memiliki latar belakang pendidikan bukan di ilmu keagamaan namun sebagian besarnya adalah lulusan pesantren yang memahami ilmu perekonomian islam, sehingga menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki oleh sebagian besar lembaga keuangan syariah.

Untuk meningkatkan kinerja karyawan BMT Masalah Memiliki program pemberian intensif, imbalan pasca kerja dan pensiun, Jaminan kesehatan karyawan, Bantuan kesejahteraan dan kesehatan untuk istri dan anak karyawan, Bantuan pendidikan untuk anak-anak karyawan. Selain itu terdapat kebijakan upah dan remunerasi serta kebijakan mengenai kesetaraan kesempatan untuk motivasi promosi jabatan. Setiap tahunnya BMT Masalah memiliki program rekreasi untuk karyawan dan keluarga karyawan.

Menurut *Stakeholder Theory*, Gray, Kouhy dan Adams mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholders sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin powerful stakeholder, maka semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholdernya (Handoko, 2014: 74). Untuk itu BMT Masalah selalu meningkatkan kinerja karyawan dengan membangun hubungan kerja yang baik dengan karyawan.

#### **4. Akuntabilitas Horizontal: Indirect Stakeholders Komunitas**

Nor Hadi (2011,88) menjelaskan bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan masyarakat (*society*), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu system yang mengedepankan keberpihakan kepada society, operasi perusahaan harus kongruen dengan harapan masyarakat. Maka BMT Masalah selalu berupaya berpartisipasi pada kegiatan masyarakat sekitar lokasi kantor operasional. Akuntabilitas horizontal indirect stakeholders komunitas yang dilakukan BMT Masalah dengan memberikan kepedulian kepada pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi (baik secara keuangan maupun non keuangan), tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan, seperti fakir, miskin dan lain-lainnya.

BMT Masalah memberikan dana sosial kepada masyarakat. BMT Masalah memberikan Zakat pada saat Bulan Ramadhan dengan memberikan bantuan sosialnya khusus untuk anggota yang tidak mampu dan masyarakat sekitar, menunjukkan bahwa BMT Masalah peduli masyarakat sehingga hal ini tentu memberikan dampak positif bagi koperasi akan banyak anggota yang merasa senang menabung di BMT Masalah, dengan menabung di BMT Masalah maka nasabah akan ikut serta dalam membantu anggota atau masyarakat sekitar yang tidak mampu. Banyak bantuan yang diberikan BMT Masalah selain dengan zakat, yakni dengan bantuan perbaikan jalan sekitar perusahaan, bantuan korban bencana alam, bantuan untuk pengadaan, dan perbaikan sarana ibadah serta bantuan kegiatan-kegiatan keagamaan & hari besar, bantuan untuk yatim piatu.

#### **5. Akuntabilitas Horizontal: Indirect Stakeholders Alam**

Akuntabilitas horizontal indirect stakeholders dengan lingkungan sekitar tidak banyak yang dilakukan. BMT Masalah mempunyai kebijakan internal yang mendukung program hemat energy dan konservasi seperti hemat air dan listrik, membantu sedikit atas perbaikan akses jalan didaerah pasar lokasi sekitar kantor operasional. Meskipun dirasa masalah lingkungan yang dianggap kurang penting bagi BMT Masalah, namun koperasi berusaha untuk membantu menjaga lingkungan sekitar. Menurut *Syariah Enterprise Theory* (SET), alam merupakan salah satu stakeholders yang harus mendapat perhatian dan memiliki hak

untuk mendapatkan kesejahteraan. Upaya untuk melestarikan atau ikut serta memperbaiki kondisi alam agar menjadi tempat yang lebih baik bagi keturunan mendatang.

Prinsip utama dari teori keagenan adalah adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principle*) yaitu pemilik atau pemegang saham dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama (Elqorni, 2009 dalam Primasari, 2011). BMT Masalahah juga menyadari hubungan keagenan dengan pemerintah setempat khususnya pemerintah dinas pasar dimana lokasi kantor BMT Masalahah beroperasi, sehingga meskipun sedikit membantu lingkungan sekitar namun BMT Masalahah berupaya untuk terus berpartisipasi.

Secara keseluruhan BMT Masalahah telah mengimplementasikan program *Corporate Social Responsibility* sesuai dengan perspektif *Syariah Enterprise Theory*. Meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi, BMT Masalahah masih berusaha peduli dengan lingkungan baik dalam perusahaan maupun luar perusahaan. BMT Masalahah berusaha menjalankan operasional perusahaan sesuai syariat Islam. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismayanti (2015) menjelaskan bahwa setiap perusahaan, terutama perusahaan Tbk., wajib menyisihkan sebagian labanya untuk kegiatan sosial, yang lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR dimaksudkan untuk menunjukkan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat sekitar tempat perusahaan mereka beroperasi. Kegiatan CSR ini perlu dilaporkan oleh perusahaan kepada masyarakat dan pemegang saham, dalam bentuk Laporan CSR.

Mansur (2012) menjelaskan pula bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh Bank Syariah masih belum sesuai dengan konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET), terutama pada bagian akuntabilitas horizontal terhadap alam. Masih sedikitnya pengungkapan CSR terhadap lingkungan menunjukkan bahwa, Bank Syariah memiliki kepedulian yang rendah terhadap lingkungan perusahaan. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan Bank Syariah masih sangat terbatas, secara sukarela, dan mengedepankan profit dalam tujuan usahanya. Hal ini menjadi tidak selaras dengan tujuan bank syariah yang didirikan dengan dasar agama yang bertujuan menciptakan keseimbangan material dan spiritual bagi pemeluknya.

## E. PENUTUP

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa BMT Masalahah telah melaksanakan *Corporate Social Responsibility* Akuntabilitas vertical terhadap Allah SWT yang dapat dianggap sebagai upaya koperasi untuk memenuhi prinsip syariah antara lain dapat dilihat melalui keberadaan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS). BMT Masalahah juga telah melaksanakan *Corporate Social Responsibility* Akuntabilitas horizontal terhadap nasabah yang dilakukan BMT Masalahah Kantor Cabang Pembantu Sumobito Jombang dengan memberikan bantuan pembiayaan kepada UMKM.

Selain itu, BMT Masalahah juga telah melaksanakan *Corporate Social Responsibility* Akuntabilitas horizontal indirect stakeholders komunitas yang dilakukan BMT Masalahah dengan memberikan kepedulian kepada pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi (baik secara keuangan maupun non keuangan), tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan, seperti fakir, miskin serta pelaksanaan kebijakan internal yang mendukung program hemat energy dan konservasi.

Dari simpulan diatas terhadap penelitian yang telah dilakukan, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menambah teori lain yang mendukung indikator penelitian sesuai syariah karena indikator dalam penelitian ini hanya mengacu pada *Syariah Enterprise*

*Theory* (SET), Selain itu obyek penelitian juga dapat diperluas tidak hanya pada salah satu kantor cabang BMT Masalahah saja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A Chariri dan Ghozali, Imam. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arifin, Zainal. 2012. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Beekun, Rafik Issa. 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Deegan, C. 2004. *Financial Accounting Theory*. Sydney: McGraw-Hill Book Company
- Djakfar, Muhammad. 2007. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press
- Fahmi, Irham. 2014. *Etika Bisnis; Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta
- Hadi, Nor. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Hadi, Sutrisno. 2009. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset
- Handoko, Yunus. 2014. Implementasi Social and Environmental Disclosure dalam Perspektif Teoritis. *Jurnal JIBEKA, Vol.8 No.2, 2014*
- Imaniyati, Neni Sri. 2010. *Aspek- Aspek Hukum BMT*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Ismayanti, Nurul Fitri. 2015. Akuntansi Corporate Social Responsibility (Csr) Pada Bank Syariah. *An-Nisbah, Vol. 01, No. 02, April 2015*
- Lahuri, Setiawan bin. 2015. Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam. *Volume 7 Nomor 2, Sya'ban 1434/2013*
- Mansur, Syuhada. 2012. Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory (Studi Kasus pada Laporan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri). *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 2 ISSN: 2088-6365*
- Mardikanto, Totok. 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*. Bandung: Alfabeta
- Meutia, Inten. 2010. *Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam (Suatu Pendekatan Kritis)*. Jakarta: Citra Pustaka Indonesia
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nursahid, Fajar. 2009. *Tanggung Jawab Sosial BUMN*. Depok: Piramedia
- Prastowo, Joko & Huda, Miftahul. 2011. *Corporate Social Responsibility, Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*. Yogyakarta: Samudera Biru.
- Primasari, Bardarita Pulung. 2011. *Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Keputusan Pendanaan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2009)*. Surakarta: Univesitas Sebelas Maret
- Siagian, Sondang P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2010. *CSR dan Comdev; Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras
- Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3
- Wibisono, Yusuf. 2009. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Jakarta: PT Gramedia
- Widjaya, Iwan Kumiawan. 2012. *Enterprise Resource Planning*. Yogyakarta: Graha ilmu

ORIGINALITY REPORT

---

**15%**

SIMILARITY INDEX

**12%**

INTERNET SOURCES

**6%**

PUBLICATIONS

**13%**

STUDENT PAPERS

---

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

4%

★ Submitted to Universitas Brawijaya

Student Paper

---

Exclude quotes      On

Exclude bibliography      On

Exclude matches      < 2%